

PERAN DINAS SOSIAL TERHADAP PENYALURAN BANTUAN SOSIAL SEBAGAI UPAYA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KOTA BANJARMASIN

Rizki Nanda Ameliya, Murdiansyah Herman, Fika Febriyanita

Ilmu Administrasi publik, 63201, Fisip, Universitas Islam Kalimantan, 17120061

Ilmu Administrasi publik, 63201, Fisip, Universitas Islam Kalimantan, 1109127301

Ilmu Administrasi publik, 63201, Fisip, Universitas Islam Kalimantan, 1121028801

E-mail : rizkinandaameliya1@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Dinas Sosial dalam hal kebijakan, regulasi, strategi dan faktor-faktor penghambat dalam penyaluran bantuan sosial sebagai upaya penanggulangan kemiskinan di Kota Banjarmasin.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif. Dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Informan penelitian ini adalah Kepala bagian Koordinasi Bantuan Sosial pada Dinas Sosial Kota Banjarmasin, Kepala Seksi Penanganan Kemiskinan pada Dinas Sosial Kota Banjarmasin dan Masyarakat penerima dan bukan penerima Bantuan Sosial. Teknik analisis data menggunakan tahapan penurunan informasi. Tampilan informasi dan penentuan hasil akhir.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peran Dinas Sosial dalam penyaluran Bantuan Sosial sebagai upaya penanggulangan kemiskinan di Kota Banjarmasin bisa dikatakan belum cukup maksimal karena masih banyak ebagian masyarakat yang memang benar-benar sangat membutuhkan bantuan tidak mendapatkan namtuan dari pemerintah dikarenakan proses pendataan yang kurang maksimal. Dalam hal ini dilihat masih ada faktor penghambat dalam pelaksanaan penyaluran bantuan adalah pengambilan bantuan yang tidak tepat waktu membuat proses penyaluran bantuan sosial menjadi penghambat, akibatnya mereka bisa saja dihapuskan dari daftar penerima bantuan dan di anggap sudah mampu oleh pemerintah.

Untuk meningkatkan peran Dinas Sosial dalam hal penanggulangan kemiskinan di Kota Banjarmasin dapat di sarankan: sebaiknya dinas sosial tidak hanya berfokus pada data masyarakat fakir miskin yang sudah diverifikasi dan lebih tepat serta lebih teliti lagi memilih sasaran bantuan yang lebih membutuhkan tetapi dinas harus juga turun langsung untuk menyalurkan bantuan, sehingga penerima bantuan tepat sasaran bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Untuk meminimalisir faktor penghambat dinas dapat menyalurkan bantuan ke alamat masyarakat langsung tanpa harus menunggu masyarakat penerima bantuan datang langsung untuk mengambil ke dinas sosial di Banjarmasin.

Kata Kunci : Bantuan Sosial , Dinas Sosial , Kemiskinan

ABSTRACT

This study aims to determine the role of the Social Service in terms of policies, regulations, strategies and inhibiting factors in the distribution of social assistance as an effort to reduce poverty in Banjarmasin City.

This study uses a descriptive qualitative approach. With data collection techniques through observation, interviews and documentation. The informants of this study were the Head of the Coordination of Social Assistance at the Banjarmasin City Social Service, the Head of the Poverty Handling Section at the Banjarmasin City Social Service and the recipients and non-recipients of Social Assistance. The data analysis technique used the stages of information reduction. Display of information and determination of the final result.

The results showed that the role of the Social Service in distributing Social Assistance as an effort to reduce poverty in Banjarmasin City could be said to have not been maximal enough because there were still many people who really really needed help did not get help from the government due to the data collection process that was less than optimal. In this case, it is seen that there are still inhibiting factors in the implementation of the distribution of aid, namely the untimely taking of aid that makes the process of distributing social assistance an obstacle, as a result they may be removed from the list of beneficiaries and considered capable by the government.

To increase the role of the Social Service in terms of poverty alleviation in the City of Banjarmasin, it can be suggested: the social service should not only focus on verified and more accurate data on the poor and be more careful in choosing the target of assistance that is more in need, but the service should also go directly to distribute aid, so that recipients of aid are right on target for people who really need it. To minimize the inhibiting factors, the agency can distribute aid to the community's address directly without having to wait for the recipient community to come directly to take it to the social service office in Banjarmasin.

Keywords: *Social Assistance, Social Service, Poverty*

PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan masalah utama negara yang sedang membangun termasuk negara Indonesia, dimana penanggulangannya perlu dilakukan dengan sungguh-sungguh, kreatif, komprehensif dan berkesinambungan. Permasalahan kemiskinan merupakan agenda serius yang sedang dihadapi dan ditanggulangi oleh wilayah perkotaan. Terjadinya kemiskinan dan masalah sosial dikarenakan oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal, yaitu ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari, ketidakmampuan dalam mengatasi masalah-masalah sosial yang dihadapinya. Kemudian faktor eksternal yaitu kebijakan publik yang belum berpihak kepada masyarakat miskin, tidak tersedianya pelayanan sosial dasar, kesenjangan, dan ketidakadilan. Kemiskinan merupakan masalah sosial yang mendasar dan sangatlah banyak dampak yang ditimbulkan. Kemiskinan dapat menyebabkan lemahnya moral dan etika, pelanggaran hukum & Hak Asasi Manusia (HAM), kerusuhan, anarkisme, serta mudah masuknya ideologi selain Pancasila, menipisnya cinta tanah air dan bela negara, serta rapuhnya persatuan dan kesatuan

bangsa. Oleh karena itu, masalah kemiskinanlah yang harus segera diselesaikan oleh negara Indonesia.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai dasar pelaksanaan kemerdekaan Provinsi merupakan salah satu persoalan yang harus diselesaikan di daerah, khususnya pihak-pihak tertentu, mengingat untuk bidang bantuan sosial pemerintah. Undang-undang tersebut direncanakan untuk mendekatkan organisasi-organisasi yang didukung pembayar pajak lebih dekat dengan kebutuhan sasaran terkait dengan bidang bantuan sosial pemerintah, sehingga individu dengan masalah bantuan pemerintah sosial dapat dikelola dengan cepat dan menyeluruh. Melalui strategi kemerdekaan wilayah, beban dan tugas pemerintah pusat yang seharusnya tidak dilakukan oleh pemerintah daerah dapat diselesaikan. Upaya untuk mengurangi kemelaratan harus dilakukan pembangunan bersama. Suatu pembangunan yang tidak hanya dapat dilakukan oleh pemerintah daerah saja, namun juga memberikan ruang yang luas bagi inklusi, dengan segala pertimbangan, untuk bekerja sama

membantu daerah dalam mengembangkan kebanggaannya.

Peraturan Walikota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 86 Tahun 2019 tentang penanggulangan Kemiskinan terpadu di Kota Banjarmasin. Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau gaji atau upah yang hanya mampu memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan /atau keluarganya. Sedangkan kemiskinan adalah suatu keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan dan kesehatan. Berdasarkan uraian-uraian diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Peran Dinas Sosial Dalam Penyaluran Bantuan Sosial Sebagai Upaya Penanggulangan Kemiskinan Di Kota Banjarmasin” karena dalam penyaluran bantuan sosial masih sangat minim untuk dilakukan dan dengan melakukan penelitian ini kita bisa mengetahui presentasi kemiskinan yang dapat ditanggulangi.

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanakah peran dinas sosial dalam hal kebijakan, regulasi, strategi, dalam penyaluran bantuan sosial sebagai upaya penggulungan kemiskinan di Kota Banjarmasin?
2. Apakah faktor penghambat dalam pelaksanaan penyaluran bantuan sosial sebagai upaya penanggulangan kemiskinan di Kota Banjarmasin?

TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui peran Dinas Sosial dalam hal kebijakan, regulasi, strategi dalam penyaluran bantuan sosial sebagai upaya penanggulangan kemiskinan di Kota Banjarmasin.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat dalam pelaksanaan penyaluran bantuan sosial sebagai upaya penanggulangan kemiskinan di Kota Banjarmasin.

TINJAUAN PUSTAKA

• Pengertian Peran

Peran dalam konteks hukum meliputi tugas, fungsi dan wewenang aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugas-tugasnya, sebagai aspek yuridis peran tersebut. Peran dalam hal ini terbagi menjadi 3 yaitu:

1. Fungsi normatif adalah fungsi yang dimainkan oleh seseorang atau lembaga berdasarkan seperangkat norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat.
2. Peran ideal adalah peran yang harus dimainkan oleh seseorang atau lembaga berdasarkan nilai-nilai ideal atau sesuai dengan tempatnya dalam suatu sistem.
3. Peran faktual adalah peran yang dimainkan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada kenyataan kongkrit di lapangan atau dalam kehidupan sosial yang sejati.

Berdasarkan definisi di atas, peran dapat didefinisikan sebagai kumpulan perilaku yang harus ditunjukkan oleh orang-orang yang hidup dalam masyarakat. Pembawa peran adalah seseorang yang memegang posisi tertentu. Hak adalah wewenang untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu, tetapi kewajiban adalah tanggung jawab atau tugas yang diberikan kepada Anda. Peran dalam suatu lembaga terkait dengan tugas dan fungsinya, mengandung makna bahwa keduanya tidak dapat dipisahkan dalam pelaksanaan pekerjaan oleh seseorang atau lembaga. Tugas adalah kumpulan bidang pekerjaan yang harus diselesaikan oleh seseorang atau organisasi sesuai dengan fungsi yang dimilikinya.

- Melakukan segala sesuatu dalam jabatannya dalam organisasi sesuai dengan bidang tugas dan wewenangnya masing-masing. Fungsi lembaga atau

institusi dirancang untuk menjadi pedoman bagi organisasi dalam melaksanakan tugas dan mencapai tujuan organisasi. Dari segi organisasi, fungsi tersebut merupakan kewenangan yuridis berdasarkan politik hukum. Ada pula kewenangan yang dikaitkan dengan hak dan kewajiban, sehingga kewenangan dipandang tidak hanya sebagai hak yang berdasarkan hukum politik, tetapi juga sebagai kewajiban yang berdasarkan hukum publik. Akibatnya, dalam menjalankan hak hukum, otoritas tidak menyiratkan kekuasaan.

- **Kemiskinan**

Kemiskinan memiliki sejumlah masalah yang kompleks, dimulai dari penyebab masalah dan berkembang melalui kebijakan yang diterapkan untuk mengatasinya. Kemiskinan di Kota Sukabumi merupakan fenomena sosial yang beragam, meliputi pendapatan rendah, kesehatan dan pendidikan yang buruk, perumahan dan ketidakamanan pribadi, dan ketidakberdayaan. Akibatnya, orang miskin terpaksa tinggal di komunitas yang tidak layak huni, dengan akses terbatas ke perawatan kesehatan, pendidikan dasar, dan peluang kerja. Kondisi ini sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Roebyantho et al (2011), yang menyatakan bahwa secara umum kemiskinan dikonseptualisasikan dalam konteks kurangnya pendapatan dan aset untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, papan, pendidikan, dan kesehatan. lingkup dimensi ekonomi) dan memenuhi kebutuhan sosial, lingkungan, pemberdayaan, dan tingkat partisipasi (ruang lingkup dimensi non-ekonomi). Mereka juga mempunyai pandangan dan ukuran sendiri tentang kesejahteraan sosial, sehingga perlu campur tangan pemerintah dan pihak-

pihak yang terkait dalam melakukan pengembangan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan sosialnya.

Orang miskin yang tidak berdaya menghadapi kesulitan internal dan eksternal memperumit situasi mereka. Kemiskinan dan masalah sosial yang berkepanjangan dapat menimbulkan kemiskinan kultural (culture poor), kurangnya kemauan/penyerahan diri/keputusan (fatalistik), dan kecenderungan untuk terlibat dalam perilaku asosial, antisosial, destruktif atau perilaku kriminal seperti pencurian, perdagangan narkoba, prostitusi, perdagangan manusia, dan sebagainya.

- **Dinas Sosial**

Secara umum tujuan dinas sosial penanggulangan masyarakat seperti salah satu pengemis dalam kesejahteraan ekonomi. Fungsi dinas sosial dan peran pekerja sosial sebagai berikut:

- a. Membantu orang meningkatkan dan menggunakan kemampuannya secara efektif untuk melaksanakan tugas-tugas kehidupan dan memecahkan masalah-masalah.
- b. Mengkaitkan orang dengan system-system sumber
- c. Memberikan fasilitas interaksi dengan system-system sumber
- d. Mempengaruhi kebijakan sosial
- e. Memeratakan atau menyalurkan sumber-sumber material

Fungsi dinas sosial antara lain:

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang sosial tenaga kerja dan transmigrasi.
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang sosial, tenaga kerja transmigrasi
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi.

Beberapa program Dinas Sosial yaitu:

- a. Program penataan administrasi kependudukan.

- b. Program pemberdayaan fakir miskin komunitas adat terpencil (KAT) dan para penyandang masalah kessos (PMKS) lainnya.
- c. Program peningkatan pelayanan kepada penduduk miskin dan penyandang masalah kesejahteraan social.
- d. Program penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tangkap cepat darurat dan LBK.
- e. Program pembinaan penyandang cacat dan exs trauma.
- f. Program pemberdayaan fakir miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial.
- g. Program peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial.
- h. Program pengembangan dan pembinaan sosial masyarakat.

Berdasarkan program Dinas Sosial di atas menggambarkan bahwa pengemis merupakan golongan penduduk miskin dan penyandang masalah kesejahteraan social. Dalam meningkatkan pelayanan kepada penduduk miskin dan penyandang masalah kesejahteraan social, Dinas Sosial mengemban tugas sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana dan program kerja \
- b. Mempersiapkan bahan pembinaan dan pengendalian usaha – usaha kesejahteraan pengemis guna meningkatkan kesejahteraan pengemis
- c. Mensosialisasikan program kerja guna memberikan pemahaman bagi fakir miskin dan pengemis.
- d. Memberikan bimbingan sosial dan pemberdayaan sosial guna meningkatkan pelayanan sosial bagi fakir miskin
- e. Memberikan bimbingan sosial dan pemberdayaan sosial guna meningkatkan pelayanan sosial yang

berada di lingkungan kurang layak huni

- f. Melaksanakan sistem pengendalian intern

- **Bantuan Sosial**

Bantuan sosial disalurkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN/APBA). Ini ditawarkan kepada orang, kelompok, atau komunitas yang kurang beruntung secara ekonomi, dan kelayakan mereka pertama kali dinilai melalui tes kemiskinan. Bantuan sosial ini dapat bersifat sementara (dalam kasus bencana alam) atau permanen (cacat dan lanjut usia). Itu dapat ditawarkan dalam bentuk uang, komoditas, atau transfer. Sifat dukungan biasanya ditawarkan dengan atau tanpa syarat. Bantuan Sosial diklasifikasikan menjadi empat macam. Pertama, bantuan dan pelayanan kesejahteraan sosial, termasuk bantuan fakir miskin, diberikan secara kelembagaan (panti asuhan, KUBE). Kedua, bantuan keuangan berupa kupon makanan atau dana tunai untuk menutupi biaya hidup. Ketiga, adanya subsidi sementara bagi orang-orang yang kehilangan pekerjaan akibat bencana alam. Keempat, kompensasi kebijakan pemerintah (subsidi BBM), serta bantuan bagi korban penggusuran.

METODE PENELITIAN

- **Penedekatan dan jenis Penelitian**

Pemeriksaan adalah usaha untuk menemukan, menciptakan dan menguji realitas suatu informasi, usaha yang digunakan untuk menemukan teknik logis. Teknik eksplorasi adalah metode logis untuk mendapatkan informasi dengan tujuan dan pekerjaan tertentu.

Dalam penelitian ini, metodologi yang digunakan adalah eksplorasi subjektif, yaitu penelitian yang berarti memahami keajaiban-keajaiban tentang apa yang mampu dilakukan oleh subjek penelitian seperti perilaku, wawasan, inspirasi,

kegiatan, dan sebagainya secara komprehensif, dan melalui penggambaran sebagai kata-kata dan bahasa, pada hal yang tidak biasa pengaturan yang normal dan dengan menggunakan teknik teratur yang berbeda (Moleong, 2005:6

- **Teknik Pengumpulan Data**

Dalam investigasi ini jenis informasi yang dikumpulkan adalah informasi penting dan informasi tambahan. Dengan tujuan akhir untuk mengumpulkan informasi dan data, strategi pemilahan informasi harus dimungkinkan dengan pertemuan, dokumentasi, dan persepsi. Namun dalam penelitian ini, proses pengumpulan informasi dibawakan oleh para ilmuwan melalui tiga teknik, yaitu:

- a. Wawancara

Pertemuan adalah pertemuan dua individu untuk bertukar data dan pikiran melalui tanya jawab, sehingga dapat dibangun kepentingan dalam suatu mata pelajaran tertentu.

- b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah catatan peristiwa yang telah berlalu. Rekaman bisa melalui komposisi, gambar, atau karya besar seseorang. Dokumentasi bukanlah catatan peristiwa yang terjadi sekarang atau nanti, melainkan catatan masa lalu. Hasil eksplorasi dari persepsi dan pertemuan akan lebih tepat bila didukung oleh arsip yang bersangkutan.

- c. Observasi

Persepsi adalah metode bermacam-macam informasi yang memiliki atribut eksplisit bila dibandingkan dengan strategi yang berbeda. Karena persepsi umumnya tidak dengan barang manusia tetapi juga barang-barang normal lainnya.

- **Teknik Analisis Data**

Mempersiapkan dan membedah informasi menggunakan pemeriksaan khusus untuk membedakan tugas administrasi sosial dalam penyaluran bantuan sosial sebagai pekerjaan untuk mengalahkan kebutuhan. Pemeriksaan grafis adalah penelitian yang bergantung pada informasi yang mencerahkan dari status, kondisi, mentalitas, koneksi atau kerangka berpikir tentang sesuatu yang sulit yang menjadi objek eksplorasi. Setelah mendapatkan informasi yang diperoleh dalam pemeriksaan ini, tahap selanjutnya adalah mengolah informasi yang terkumpul dengan memecah informasi, menggambarkan informasi, dan mencapai penentuan.

Untuk memecah informasi ini menggunakan prosedur pemeriksaan informasi subjektif. Karena informasi yang diperoleh merupakan bermacam-macam data. Langkah investigasi informasi dimulai dengan melihat semua informasi yang dapat diakses dari berbagai sumber, khususnya melalui pertemuan, dokumentasi, dan persepsi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran dinas sosial dalam hal kebijakan, regulasi, strategi, dalam penyaluran bantuan sosial sebagai upaya pengurangan kemiskinan di Kota Banjarmasin

Kemiskinan di Indonesia masih merupakan masalah yang belum dapat diatasi. Menurut Badan Pusat Statistik, persentase penduduk miskin pada Maret 2019 sebesar 9,41 persen. Pada Maret 2019, terdapat 25,14 juta penduduk miskin di Indonesia. Pada tahun 2020, angka kemiskinan di Indonesia naik menjadi 27,55 persen atau 27,76 juta orang dibandingkan tahun sebelumnya, akibat dampak Covid-19. Hal ini menjadikan kemiskinan sebagai salah satu masalah sosial yang perlu diperhatikan lebih oleh Pemerintah.

Kemiskinan disebabkan oleh beberapa keadaan, antara lain kurangnya pendidikan, sikap lamban terhadap pekerjaan, kelangkaan sumber daya alam, kelangkaan kesempatan kerja, dan kelangkaan modal. Selain sebab-sebab tersebut, kemiskinan dipengaruhi oleh kebijakan publik yang tidak berpihak pada masyarakat miskin, kurangnya pelayanan sosial yang esensial, ketimpangan, dan ketidakadilan. Berdasarkan temuan wawancara dengan Kepala Badan Koordinasi Bantuan Sosial pada Dinas Sosial Kota Banjarmasin, kebijakan, peraturan, dan strategi dalam penyaluran Bantuan Sosial hanya didasarkan pada validasi dan verifikasi data yang diperoleh dari kepala RT berdasarkan tempat tinggal. Artinya, hanya mereka yang saat ini menjadi ketua RT yang akan dikonfirmasi dan disahkan, dan berhak mendapatkan Bantuan Sosial. Dinas Sosial memberikan bantuan berupa sembako bagi masyarakat yang menerimanya.

Menurut mereka yang mendapat bantuan, penyaluran bantuan masih melenceng karena tidak semua warga miskin bisa mendapatkan Bantuan Sosial. Sebenarnya tugas PNS hanya mendistribusikan dan mengawasi penyaluran bantuan agar tepat sasaran, agar data penerima bansos menerima dari data kependudukan yang telah diverifikasi sebagai penerima bantuan, dan jika tidak diverifikasi sebagai penerima bantuan, dinyatakan bahwa masyarakat termasuk dalam kategori mampu dan tidak berhak menerima bantuan.

Kenyataannya, tidak semua orang dapat memenuhi kebutuhan perumahannya karena keterbatasan finansial atau kemiskinan. Aturan yang diterapkan oleh dinas sosial dalam penyaluran bansos didasarkan pada Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 yang mengatur tentang tata cara penggunaan data terpadu untuk program-program yang menangani masyarakat miskin. Menurut definisi ini,

orang miskin adalah orang yang tidak mempunyai sumber penghasilan dan/atau mempunyai sumber penghasilan tetapi tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok untuk kelangsungan hidup dirinya dan/atau keluarganya. Komunitas memenuhi syarat untuk mendapatkan dukungan berdasarkan kriteria ini. Penanganan Masyarakat Miskin adalah upaya yang terarah, menyeluruh, dan berjangka panjang oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar seluruh warga negara melalui kebijakan, program, dan kegiatan. Akibatnya, didas sosial harus tepat dalam menyalurkan bantuan kepada fakir miskin.

Faktor penghambat dalam pelaksanaan penyaluran bantuan sosial sebagai upaya penanggulangan kemiskinan di Kota Banjarmasin

Manusia memiliki berbagai tuntutan yang harus dipenuhi sesegera mungkin. Salah satu kebutuhan tersebut adalah kebutuhan dasar (basic needs), dan oleh karena itu kebutuhan dasar ini terikat dengan kehidupan dan kelangsungan hidup manusia. Apabila keinginan-keinginan dasar tersebut tidak segera ditanggulangi maka akan menimbulkan masalah bagi masyarakat, seperti orang tersebut tidak dapat menjalankan fungsi sosialnya atau menjadi sejahtera secara sosial. Lambatnya masyarakat penerima dalam menerima bantuan bakti sosial menjadi kendala dalam pelaksanaan penyaluran bantuan; mereka berpendapat bahwa mereka lambat untuk mengambilnya karena ada halangan, maka mereka lambat untuk mengambilnya. Akibatnya, dinas sosial membatasi pengumpulan bantuan; misalnya, jika mereka tidak menerima bantuan selama empat bulan, lembaga akan menghapus data penerima bantuan karena mereka dianggap mampu dan tidak memerlukan bantuan. Seharusnya dinas sosial tidak harus menunggu penerima bantuan datang ke

dinas untuk mengambil tapi dinas juga harus bisa menyalurkan bantuan langsung ke penerima bantuan. Sehingga bantuan tidak tertumpuk di dinas.

KESIMPULAN & SARAN

• Kesimpulan

1. Peran Dinas Sosial dalam penyaluran Bantuan Sosial sebagai upaya penanggulangan kemiskinan di Kota Banjarmasin bisa dikatakan belum cukup maksimal karena masih banyak sebagian masyarakat yang memang benar-benar sangat membutuhkan bantuan tidak mendapatkan bantuan dari pemerintah dikarenakan proses pendataan yang kurang maksimal.
2. Faktor penghambat dalam pelaksanaan penyaluran bantuan adalah pengambilan bantuan yang tidak tepat waktu membuat proses penyaluran bantuan sosial menjadi penghambat, akibatnya mereka bisa saja dihapuskan dari daftar penerima bantuan dan di anggap sudah mampu oleh pemerintah.

• Saran

1. Sebaiknya dinas sosial tidak hanya berfokus pada data masyarakat fakir miskin yang sudah diverifikasi dan lebih tepat serta lebih teliti lagi memilih sasaran bantuan yang lebih membutuhkan tetapi dinas harus juga turun langsung untuk menyalurkan bantuan, sehingga penerima bantuan tepat sasaran bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
2. Untuk meminimalisir faktor penghambat dinas dapat menyalurkan bantuan ke alamat masyarakat langsung tanpa harus menunggu masyarakat penerima bantuan datang langsung untuk mengambil ke dinas sosial di Banjarmasin.

DAFTAR PUSTAKA

Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012

Burhan Bungin, 2007, Penelitian Kualitatif, Jakarta : Prenada Media Group

Dasril Arifin, Skripsi, 2013 : "Peran Dinas Sosial Terhadap Penanggulangan Angka Kemiskinan Di Kabupaten Siak" Pekanbaru : UIN Sultan Syarif Kasim.

Didin Ismoyo. 2017. Peran Pemerintah Desa Dalam Penanggulangan Kemiskinan (Studi Pemerintah Desa Cangkol Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo). (Surakarta : Skripsi Universitas Muhammadiyah)

Hikmawati, 2016. Peran Dinas Sosial Dalam Penyaluran Bantuan Sosial Sebagai Upaya Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan Di Provinsi Lampung. (Lampung : Skripsi UNILA)

Heryanti. 2019. Peran Dinas sosial Kabupaten Bone dalam Menanggulangi kemiskinan (Perspektif Undang-Undang nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial). Jurnal Al-Dustur ; VOLUME 2 NO 2

H. Matnuh, 2016, Peran Dinas Dalam Penanggulangan Anak Jalanan di Kota Banjarmasin,

Mariama Qamariah. 2010. Implementasi Program Bantuan Sosial Dalam Pemenuhan Kebutuhan Lansia Terlantar (Studi Pada Dinas Sosial Kota Batu). Jurnal Respon Publik Vol. 14 , No. 4, Tahun 2020, Hal: 1-7

Muslim Sabarisman. 2015. Peran dinas sosial dalam penanggulangan

kemiskinan di kota sukabumi. Sosio
konsepsia Vol. 4, No. 03,

Munandar Soelaeman, 1986, Ilmu Sosial
Dasar teori dan Konsep Ilmu Sosial,
Bandung: Refika Saditama

Nano Prawoto, 2009. Memahami
Kemiskinan Dan Strategi
Penanggulangannya. Jurnal Ekonomi
dan Studi Pembangunan Volume 9,
Nomor 1, April 2009: 56 - 68

NI Pratiwi, 2017, Jurnal Ilmiah Dinamika
Sosial Volume 1, Nomor 2,

Sahdan, Gregorius. 2005. Mengganggu
Kemiskinan Desa. Artikel-Ekonomi
Rakyat dan Kemiskinan. Yogyakarta.

Soerjono Soekanto, 2010, Sosiologi Suatu
Pengantar, Jakarta : Rajagrafindo
Persada

Suryahadi, Asep dan Sumarto. "Memahami
Kemiskinan Kronis dan Kemiskinan
Sementara di Indonesia." Smeru
Newsletter, No.03, Mei – Juni.2001.

Viki Setiawan Rambe, 2019. Peran Dinas
Sosial Dalam Melakukan Bimbingan
Terhadap Program Keluarga Harapan
Dalam Pengentasan Kemiskinan Di
Kelurahan Saentis Kabupaten Deli
Serdang. (Sumatera Utara : Skripsi
Universitas Islam Negeri)

Wati, Hikmah. 2016. "Peran Dinas Sosial
Dalam penyaluran Bantuan Sosial
Sebagai Upaya Penanggulangan
Kemiskinan perkotaan di Provinsi
Lampung". Bandar Lampung:
Universitas Lampung.

Zamzam, 2018, Faktor yang Mempengaruhi
Tingkat Kemiskinan di Desa Madello
Kecamatan Balusu Kabupaten Barru